

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Untuk mengetahui berhasil atau tidaknya ekonomi suatu daerah maka digunakan suatu indikator yang disebut pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat didorong dengan pengendalian berbagai kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, kebijakan moneter, dan kebijakan luar negeri. Selain itu, system dari kelembagaan pemerintahan juga harus berpengaruh terhadap pembangunan ekonomi. Jika dilihat dari sistem pemerintah di Indonesia sendiri telah mengalami perubahan dari masa ke masa dimana di Indonesia telah menjalankan 2 sistem pemerintahan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Sistem sentralisasi dijalankan Indonesia pada masa orde baru sedangkan sistem pemerintahan desentralisasi dilaksanakan sejak reformasi atau pada saat runtuhnya pemerintahan orde baru.

Di Indonesia wujud dari desentralisasi dituangkan dalam peraturan Otonomi daerah, menurut Undang-undang No. 32 Tahun 2004 desentralisasi didefinisikan sebagai penyerahan segala kewenangan yang meliputi bidang legislatif, yudikatif, maupun administratif dari pemerintahan pusat ke pemerintahan yang lebih rendah (pemerintah daerah) sehingga suatu daerah memiliki suatu tanggung jawab untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahannya sendiri seperti dalam hal perumusan maupun pelaksanaan APBD.

APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan

Peraturan Daerah (Permendagri No.13 Tahun 2006). Pasal 79 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 serta pasal 3 dan 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Pasal 157 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 menyatakan, bahwa sumber pendapatan/penerimaan daerah terdiri atas: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Beberapa komponen dalam APBD sendiri yang nilainya paling banyak diterima oleh daerah yakni, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Halim (2004) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yang bersumber dari : pajak daerah, restribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan PAD lain-lain yang sah, yang tercantum dalam undang-undang No. 33 pasal 6 Tahun. Agar sumber PAD dapat terkelola dengan baik, maka diperlukan perhatian dari pemerintah daerah baik secara intensifikasi ataupun ekstesifikasi dalam pengelolaan dan pengoptimalan sumber-sumber pendapatan tersebut. Sehingga PAD nantinya dapat memberikan dampak terhadap peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut.

Dana perimbangan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000, dimana dalam pasal 1 ayat 2 disebutkan bahwa dana perimbangan adalah sumber pendapatan daerah yang diperoleh berdasarkan pengalokasian dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang ditujukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah untuk mencapai dan menyelenggarakan pemberian otonomi daerah yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat agar semakin meningkat

dan mengalami perbaikan. Dana Perimbangan sendiri terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil.

DAU dan DAK dialokasikan untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) *Netto* yang ditetapkan dalam APBN. Proporsi DAU untuk daerah provinsi dan untuk daerah kabupaten/kota ditetapkan sesuai dengan imbalan kewenangan antara provinsi dan kabupaten/kota. Proporsi DAU terhadap penerimaan daerah masih yang tertinggi dibandingkan dengan penerimaan daerah yang lain, termasuk PAD (Pendapatan Asli Daerah). DAK dialokasikan kepada daerah tertentu untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas nasional yang menjadi urusan daerah (dalam pasal 50 ayat 2 PP Republik Indonesia No. 55 Tahun 2005 tentang dana perimbangan).

Menurut Maryati (2010) sumber – sumber keuangan dari pemerintahan daerah berasal dari PAD, DAU dan DAK. Merujuk pada keterkaitan antara Pendapatan Asli Daerah dengan otonomi dimana setiap peningkatan PAD akan meningkatkan penerimaan daerah yang nantinya digunakan untuk pembiayaan program daerah yang pada akhirnya akan meningkatkan perekonomian daerah. Atmaja (2007) mengatakan bahwa PDRB sebagai tolak ukur pendapatan masyarakat memiliki hubungan fungsional dengan PAD dimana ketika PDRB suatu daerah meningkat maka akan menambah penerimaan daerah dalam pembiayaan program pembangunan daerah dan begitupun sebaliknya.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat, dalam 5 tahun terakhir bahwa perkembangan PAD Kota Padang masih menjadi barometer perekonomian di Sumatera Barat, dibuktikan dengan jumlah PAD Kota

Padang sendiri pada tahun 2013 sebesar Rp. 238.871.896.576 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 547.764.962.653 dengan nilai rata-rata PAD dari tahun 2013-2017 Kota Padang mencapai Rp. 373.009.015.610 disusul dengan perkembangan PAD kedua terbesar adalah Kabupaten Tanah datar dengan jumlah PAD pada tahun 2013 sebesar Rp. 63.835.094.000 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 128.397.031.000 dengan nilai rata-rata PAD dari tahun 2013-2017 sebesar Rp. 101.646.280.000 sedangkan daerah yang memiliki perkembangan PAD terendah adalah Kota Pariaman dengan jumlah PAD pada tahun 2013 sebesar Rp. 20.639.404.314 dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 32.035.079.870 dengan nilai rata-rata PAD dari tahun 2013-2017 hanya mencapai Rp. 26.536.099.699.

Kota Padang merupakan satu dari sembilan belas Kabupaten dan Kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat. Memiliki luas $\pm 694,96 \text{ km}^2$ dari luas wilayah Provinsi Sumatera Barat, yang memiliki skala ekonomi tertinggi dari Kota / Kabupaten yang ada di Sumatera Barat. Hal ini terlihat dari kontribusinya terhadap pembentukan PDRB Provinsi Sumatera Barat.

Tingginya nilai PAD Kota Padang disebabkan karena kota ini merupakan kota perdagangan dan juga daerah penghubung bagi daerah-daerah disekitarnya. Disamping itu, Kota Padang memiliki Bandara Internasional, dan pelabuhan Teluk Bayur sebagai sarana lalu-litas yang akan selalu digunakan oleh daerah-daerah lain yang ada disekitarnya. Artinya Kota Padang memiliki potensi sumberdaya alam dan sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan di masa mendatang yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, kualitas sumberdaya manusia, kualitas pelayanan publik dan kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan daerah. Selanjutnya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan

kualitas sumberdaya telah mendorong terjadinya transformasi dalam berbagai bidang pembangunan.

Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam pembiayaan pembangunan merupakan komponen yang sangat penting dan strategis dalam upaya meningkatkan dan memperbesar ruang fiskal keuangan daerah untuk membiayaan pembangunan daerah. Peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat juga dijadikan sebagai indikator terhadap aktifitas dan kapasitas ekonomi di daerah. Semakin besar penerimaan PAD maka akan semakin besar pula aktifitas dan kapasitas ekonomi yang dimiliki oleh daerah tersebut.

Pada prinsipnya, pemungutan PAD oleh pemerintah daerah bukanlah untuk membebani masyarakat. Namun, pemungutan tersebut dapat dijadikan sebagai salah satu sumber biaya untuk membangun infrastruktur tersebut akan dapat mendorong dan merangsang serta berkembangnya potensi ekonomi daerah, sehingga dengan demikian aktivitas dan kapasitas ekonomi akan meningkat. Peningkatan aktivitas dan kapasitas ekonomi tersebut akan dapat membuka lapangan kerja dan menyerap pengangguran di daerah itu sendiri.

Menurut Saleh (2017), Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sesuai dengan penelitian Siagian (2018) yang mana Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus juga memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, hal ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan Suandi (2016), yang mana hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa DAK memiliki dampak pada pertumbuhan ekonomi namun, PAD dan DAU tidak

berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi. Penelitian yang dilakukan oleh Maryati (2010) juga memiliki hasil penelitian yang berbeda dengan ketiga penelitian tadi, yang mana hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa hanya Dana Alokasi Khusus yang tidak memiliki pengaruh terhadap Pertumbuhan Ekonomi, selebihnya memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi.

Dari pemaparan diatas, penulis tertarik meneliti lebih lanjut sejauh apa pengaruh PAD, DAU dan DAK memengaruhi Pertumbuhan Ekonomi. dalam penelitian ini penulis mengambil sampel Kota Padang dikarenakan Kota Padang merupakan Kota yang memiliki nilai PAD, DAU dan DAK tertinggi dari 19 Kab/Kota yang ada di Sumatera Barat, sehingga penulis memberi judul penelitian ini dengan **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Padang”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Tahun 2001 – 2017 di Kota Padang ?
2. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Tahun 2001 – 2017 di Kota Padang ?
3. Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Tahun 2001 – 2017 di Kota Padang ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagaimana rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan pada penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisa pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Tahun 2001 – 2017 di Kota Padang.
2. Untuk menganalisa pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Tahun 2001 – 2017 di Kota Padang.
3. Untuk menganalisa pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Tahun 2001 – 2017 di Kota Padang.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang diharapkan dalam penelitian ini adalah :

1. Instansi pemerintahan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi, perbandingan dan bahan acuan bagi instansi pemerintahan dalam rangka upaya peningkatan kinerja pemerintahan daerah Kota Padang, dan melihat ukuran keberhasilan otonomi daerah untuk melihat kemampuan keuangan yang bertujuan dapat mengetahui kemampuan keuangan daerah Kota Padang.

2. Ilmu pengetahuan

Penelitian ini diharapkan berfungsi sebagai sumber informasi dan tambahan ilmu pengetahuan untuk mahasiswa Universitas Andalas, terutama Jurusan Ilmu Ekonomi, dan terkhusus terhadap pengetahuan mengenai keterkaitan keuangan daerah dengan Pertumbuhan Ekonomi.

3. Peneliti selanjutnya

Sebagai bahan referensi dan pengembangan untuk kalangan akademis dan peneliti berikutnya.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Adapun cakupan wilayah dalam penelitian ini adalah Kota Padang yang mana Kota Padang merupakan Ibukota dan menjadi kota terbesar di Provinsi Sumatera Barat. Yang mana variabel bebas dalam penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK). Sedangkan variabel terikat dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Periode analisis dari tahun 2001 sampai tahun 2017.

1.6 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis mengelompokkan penulisan agar lebih jelas mengenai batasan-batasan sesuai dengan sistematika berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Latar belakang, rumusan masalah yang ada, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian serta ruang lingkup penelitian dan sistematika penulisan.

BAB 2 : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab 2 ini penulis menguraikan tentang teori yang digunakan serta penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis dan hipotesis penelitian.

BAB 3 : METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjelaskan jenis penelitian, daerah penelitian, data dan sumber data penelitian, teknik pengumpulan data, serta metode analisis yang digunakan dalam penelitian.

BAB 4 : GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum tempat penelitian atau deskripsi objek penelitian.

BAB 5 : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai uraian hasil dari penelitian dan pembahasan.

BAB 6 : PENUTUPAN

Dalam bab terakhir ini berisikan kesimpulan singkat dari keseluruhan bab yang terdapat dalam penulisan ini. Selanjutnya terdapat juga saran yang nantinya dapat menjadi acuan pengembangan lebih lanjut.

